

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2021
TENTANG PENATAAN DAN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT
BERKELANJUTAN KABUPATEN TABALONG
(STUDI KASUS PASAR PAMARANGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Program Studi Administrasi Publik



**OLEH
HUSNUL KHATIMAH
NPM: 2022241**

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
AMUNTAI
2025**

TANDA PERSETUJUAN

Mahasiswa yang telah disetujui skripsinya :

NAMA : HUSNUL KHATIMAH

NPM : 2022241

PROGRAM : ADMINISTRASI PUBLIK

JUDUL :

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 41
TAHUN 2021 TENTANG PENATAAN DAN
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT
BERKELANJUTAN KABUPATEN TABALONG
(STUDI KASUS PASAR PAMARANGAN)** setelah diteliti
dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujui
untuk diajukan dan dipertahankan di depan sidang Tim
Penguji Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA)
Amuntai.

Pembimbing I,

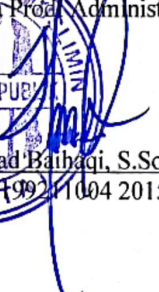


Ramona Handayani, S.Pd. M.A
NUPTK. 8147760661300103

Amuntai, 12 Februari 2026
Pembimbing II,



Siti Paulina, M.Pd.
NUPTK. 0443772673230232

Mengetahui
Ketua Prodi Administrasi Publik,

Ahmad Baihaqi, S.Sos, M.A
NUPTK. 199211004 201509 021



KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Sholawat serta salam senantiasa tercurah Kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau hingga akhir zaman. Syukur Alhamdulillah, Atas kehadiran Allah SWT, limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENATAAN DAN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT BERKELANJUTAN KABUPATEN TABALONG (STUDI KASUS PASAR PAMARANGAN)”**.

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-ide, maupun pemikiran. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Reno Affrian, S.Sos., M.AP., CIQaR,CIQnR, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
2. Ibu Ramona Handyani, S.Pd. M.A. selaku pembimbing 1 yang mana telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan penuh kepada penulis untuk membuat proposal ini.
3. Ibu Siti Paulina, M.Pd. selaku pembimbing 2 yang mana telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan penuh kepada penulis untuk membuat proposal ini.

4. Seluruh dosen pengampu mata kuliah di Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai Program studi Ilmu Administrasi Publik, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sehingga dapat menambah keilmuan penulis.

Dalam proses penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan. Peneliti menyadari tidak mungkin dapat selesai tanpa arahan dari pembimbing, dikarenakan keterbatasan kemampuan yang dimiliki peneliti. Sehingga peneliti membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk kemajuan di masa yang akan datang

Tanjung, November 2025

Husnul Khatimah.

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Tinjauan Teoritis	9
C. Kerangka Pemikiran	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	24
B. Pendekatan Penelitian	24
C. Tipe penelitian	25
D. Data dan Sumber Data	26
E. Desain Operasional Penelitian	27
F. Teknik Pengumpulan Data	28
G. Teknik Analisis Data	30
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 3. 1 Data Informan	27
Tabel 3. 2 Desain Operasional Penelitian	28

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia terjadi banyak perubahan dan pembangunan dalam segala bidang, dimana pada satu sisi memperlihatkan manfaat pada sebagian masyarakat. Keberhasilan pembangunan suatu negara tidak terlepas dari andil pemerintah dalam menghasilkan atau mengeluarkan kebijakan sesuai permasalahan yang dihadapinya. Salah satu komponen proses kebijakan sebagai solusi, maka kebijakan publik menjadi penting untuk diformulasikan, diimplementasikan dan dievaluasi. Proses kebijakan publik berbentuk implementasi program atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan itu sendiri merupakan aturan pemerintah yang harus dilaksanakan atau diikuti oleh siapapun tanpa terkecuali. Kebijakan dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan peraturan pelaksanaan.

Banyak masalah implementasi kebijakan yang belum efektif dikarenakan para implementer kebijakan belum mampu mengaktualisasikan kebijakan tersebut secara efektif. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi memberikan kebijakan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang perekonomian. Di dalam suatu kebijakan ini diperlukan adanya implementasi atau tindakan-tindakan yang dilakukan, baik oleh individu, pemerintah maupun swasta yang sudah diarahkan pada pencapaian tujuan sasaran yang ditetapkan, namun di

sisi lain memberikan dampak yang kurang menguntungkan. Berbagai masalah muncul dari masalah birokrasi hingga sumber daya manusia yang masih kurang menguasai bidang tersebut. Salah satu entitas yang secara langsung ikut berkompetisi dalam spirit persaingan perekonomian adalah pasar.

Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, super market, mini market, mall, plaza pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Pasar adalah suatu bentuk pasar nyata, sebagaimana definisi pasar seutuhnya, dimana barang yang diperjualbelikan bisa dipegang oleh pembeli. Barang yang diperjualbelikan di pasar biasanya adalah barang-barang kebutuhan sehari-hari. Pasar tradisional merupakan pasar yang dikelola secara sederhana dengan bentuk fisiknya tradisional yang menerapkan sistem transaksi tawar menawar secara langsung dimana fungsi lamanya adalah untuk melayani kebutuhan masyarakat baik di desa, kecamatan dan lainnya. Harga di pasar mempunyai sifat yang tidak pasti, oleh karena itu bisa dilakukan tawar menawar. Kecenderungan keinginan masyarakat belanja di pasar tradisional menurun, hal ini dikarenakan keinginan masyarakat belanja dipasar modern meningkat.

Dilihat dari perkembangannya, pasar dapat diartikan sebagai lembaga yang paling penting dalam institusi ekonomi yang dikelola oleh pemerintah sehingga transaksi perdagangan dapat terjadi dengan baik, pasar berkembang menjadi salah satu penggerak utama dalam kegiatan ekonomi masyarakat dan kegiatan ekonomi masyarakat tidak akan berjalan tanpa adanya pasar. Penataan pasar merupakan segala upaya yang dilakukan pemerintah daerah

untuk mengatur dan menata meliputi pembangunan dan revitalisasi pasar. Dalam penataan ini banyak pedagang yang melakukan pelanggaran terhadap penataan tempat yang sudah disediakan pemerintah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong juga telah melakukan berbagai upaya dalam menangani masalah pengelolaan pasar. Pengelolaan atau penataan pasar merupakan suatu kebijakan pemerintah dalam penataan pasar khususnya yang ada di Kabupaten Tabalong. Pasar khusus adalah pasar tradisional dimana barang yang diperjualbelikan bersifat khusus atau spesifik. Dalam ('Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat Berkelanjutan', 2021) tentang pengelolaan pasar pemerintah kabupaten tabalong, dijelaskan bahwa pasar merupakan salah satu entitas ekonomi strategis yang berfungsi mendinamisasi dan juga mengakselerasi percepatan ada pertumbuhan ekonomi khususnya pada sektor perdagangan.

Seiring dengan berjalannya waktu, pasar tradisional kini mulai kehilangan multi fungsinya sebagai penyedia kebutuhan yang awalnya memenuhi kebutuhan secara general yaitu meliputi individu, rumah tangga maupun organisasi, saat ini bisa dikatakan secara kuantitas minat individu mulai berkurang dengan keberadaan pasar modern yang lebih menjanjikan beberapa hal yang tidak diberikan oleh pasar tradisional misalnya, keterjangkauan tempat, fasilitas pelayanan, kualitas produk, dan ragam produknya. Dengan demikian, berdasarkan observasi penulis mengetahui adanya permasalahan yang muncul pada Pasar Pamarangan Kabupaten Tabalong diantaranya:

1. Dalam Penataan Dan Pengelolaan Pasar Rakyat Berkelanjutan Di Pasar Pamarangan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong masih minimnya ketersediaan fasilitas pendukung yang memadai. Fasilitas dasar seperti kios permanen, lapak dan tempat sampah khusus di segala sisi pasar masih sangat terbatas atau bahkan belum tersedia secara merata.
2. Masih banyak pedagang menggunakan bahu jalan di lingkungan pasar yang menimbulkan dengan adanya kemacetan karena bangunan yang disediakan telah penuh serta penataan pasar yang kurang tertata sesuai dengan dagangan jualan pedagang. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 16 ayat 1 huruf e “Penataan Pedagang Pasar”
3. Tidak tersedianya lahan khusus untuk parkir, sehingga banyak juru parkir yang membuka lahan parkir sendiri, bahkan sampai ke bahu jalan raya. Menyebabkan ketidaknyamanan para pejalan kaki yang terpaksa berjalan di bahu jalan dan menyebabkan kemacetan. Hal ini melanggar peraturan Bupati No 41 tahun 2021 Pasal 11 huruf m “Tempat Parkir”.

Berdasarkan uraian permasalahan yang dikemukakan pada latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian tentang **“IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENATAAN DAN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT BERKELANJUTAN KABUPATEN TABALONG (STUDI KASUS PASAR PAMARANGAN).**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dari permasalahan pada latar belakang yang terdapat di Pasar Pamarangan Kabupaten Tabalong tentang Implementasi Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penataan Dan Pengelolaan Pasar Rakyat Berkelanjutan Kabupaten Tabalong (Studi Kasus Pasar Pamarangan), maka untuk membatasi permasalahan yang akan diteliti, penelitian ini hanya memfokuskan tentang implementasi kebijakan menurut teori Van Metter Dan Van Horn (Dalam Subarsono, 2021:99). Terdapat Enam variabel yang memengaruhi kinerja implementasi yaitu:

1. Standar Dan Sasaran Kebijakan.
2. Sumber Daya.
3. Komunikasi Antar Organisasi
4. Karakteristik Agen Pelaksana.
5. Kondisi sosial, Ekonomi dan Politik.
6. Disposisi Implementor

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penataan Dan Pengelolaan Pasar Rakyat Berkelanjutan Kabupaten Tabalong (Studi Kasus Pasar Pamarangan).

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penataan Dan Pengelolaan Pasar Rakyat Berkelanjutan Kabupaten Tabalong (Studi Kasus Pasar Pamarangan).

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penataan Dan Pengelolaan Pasar Rakyat Berkelanjutan Kabupaten Tabalong (Studi Kasus Pasar Pamarangan).
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penataan Dan Pengelolaan Pasar Rakyat Berkelanjutan Kabupaten Tabalong (Studi Kasus Pasar Pamarangan).

E. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian ini adalah:

1. Dapat digunakan sebagai bahan masukan atau pertimbangan terhadap pihak Pasar Pamarangan Kabupaten Tabalong guna menghasilkan perbaikan pengelolaan dan penataan.
2. Bagi peneliti merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan program sarjana (S1) pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
3. Sebagai bahan masukan untuk kajian ulang bagi yang ingin meneliti lebih lanjut dan bahan bacaan bagi mahasiswa khususnya mahasiswa pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah suatu hal yang sangat penting guna sebagai pijakan dalam rangka menyusun penelitian ini. Tujuannya untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, sekaligus menjadi bahan perbandingan dan gambaran untuk mendorong kegiatan penelitian. Hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Erna Rustiana (2022) Universitas Garut, Jawa Barat, Indonesia, **Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional di Kecamatan Samarang Kabupaten Garut (Studi Pasar Wisata Samarang)**. Penelitian dilatarbelakangi upaya pengelolaan pasar oleh pemerintah Kabupaten Garut dalam rangka memenuhi standar kenyamanan bagi para pembeli maupun pedagang di pasar, serta untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi. Permasalahan yang muncul adalah belum terbitnya landasan hukum yang jelas dalam tata kelola pasar wisata, kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga fasilitas pasar, dan pengelolaan pasar masih belum baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penataan dan pembinaan pasar tradisional di Kabupaten Garut dengan objek Pasar Wisata Samarang. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa implementasi penataan dan pembinaan pasar tradisional belum dilaksanakan secara optimal,

dilihat dari sasaran dan tujuan yang belum memberikan arah kebijakan yang jelas, belum didukung sumber daya yang handal dan kompeten, serta belum adanya pembinaan yang baik kepada para pedagang terkait optimalisasi pemanfaatan pasar wisata Samarang sebagai *center of market* Kabupaten Garut. Kesimpulannya faktor penghambat implementasi kebijakan disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat tentang kebersihan, adanya rangkap jabata, proses rekrutmen pegawai belum dijalankan secara professional, dan dibutuhkan pembinaan yang jelas kepada pedagang dan pembeli tentang pengelolaan pasar yang berkualitas.

2. Ahmad Rijali Noor (2024), Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.” **Implementasi Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penataan Dan Pengelolaan Pasar Rakyat Berkelanjutan Kabupaten Tabalong (Studi Kasus Pasar Muara Uya)”**.

Fenomena tidak tersedia beberapa sarana dan prasarana seperti pos keamanan tidak dikelola dan tidak ada parkir khusus, banyak pedagang menggunakan bahu jalan pasar, adanya kemacetan karena bangunan disediakan telah penuh, penataan pasar kurang tertata sesuai jualan pedagang. Tujuan penelitian mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat Berkelanjutan Kabupaten Tabalong (Studi Kasus Pasar Muara Uya). Penelitian pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data sampel purposive sampling. Data dianalisis dengan teknik reduksi, penyajian data, dan

kesimpulan. Pengujian kredibilitas data perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, referensi dan member check. Hasil penelitian belum optimal Pertama, subvariabel komunikasi indikator transmisi dan kejelasan belum baik, konsisten cukup baik. Kedua, subvariabel sumber daya indikator staf dan wewenang cukup baik, fasilitas belum baik Ketiga, subvariabel disposisi indikator pengangkatan birokrasi dan insentif cukup baik. Keempat, subvariabel struktur birokrasi indikator SOP dan fregmentasi cukup baik. Faktor pendukung terjalin koordinasi baik antar badan pelaksana, faktor penghambat kurangnya tindakan tegas pelanggaran pasar dan kurangnya sosialisasi dilihat kurang jelasnya kebijakan. Disarankan: Kepala Disperindag Tabalong dan Kepala UPT Pasar Muara Uya melakukan sosialisasi dengan pedagang setiap 3 bulan.

B. Tinjauan Teoritis

1. Pengertian Implementasi

Kata implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan tertentu. Implementasi juga sering disebut sebagai suatu proses rangkaian suatu kegiatan akan ditindak lanjuti setelah sebuah rencana dan kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan. Secara timologis, implementasi dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan dengan penggunaan saran untuk memperoleh hasil atau mencapai maksud yang diinginkan. Implementasi adalah sebuah proses interaksi antara penentuan tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan

tersebut. Jadi inti dasar suatu implementasi adalah “membangun hubungan” dan mata rantai agar supaya kebijakan bisa berpengaruh terhadap kebijakan (Nawi, 2018).

Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan* mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan, “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan Tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”.

Sedangkan menurut Hanifah Harsono dalam bukunya yang berjudul *Implementasi Kebijakan dan Politik* mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi yaitu “Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program”.

Menurut Mazmanian & Sabatier (dalam Agustino, 2016:128) Implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan biasanya dalam bentuk undang-undang, tapi dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting ataupun keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya.

Nugroho (2016) menyatakan implementasi kebijakan dalam prinsipnya adalah suatu cara agar sebuah kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik demi mencapai tujuannya. Untuk menjalankan

suatu kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yaitu dengan cara langsung melaksanakan dalam bentuk program kebijakan atau melalui langkah memformulasikan kebijakan turunan dari kebijakan tersebut.

Menurut Leo Agustino (2016:128) mengatakan bahwa Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan karena melalui prosedur inilah suatu masalah publik dapat diselesaikan atau tidak.

Penting disini karena dalam suatu ketetapan kebijakan hanya akan sekadar menjadi impian atau rencana bagus saja yang tersimpan rapi dalam arsip jika tidak dilaksanakan.

Lanjutnya, Leo Agustino mengatakan bahwa implementasi kebijakan berkaitan dengan adanya tujuan atau sasaran, adanya aktivitas dan adanya hasil. Dari ketiga hal menurut Leo tersebut, maka implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktifitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Implementasi kebijakan publik dilaksanakan dalam dua wujud yaitu wujud program dan kebijakan publik tambahan. Pada prinsipnya implementasi kebijakan publik dalam bentuk program diimplementasikan ke bawah dalam bentuk proyek, kegiatan dan pemanfaatan yang sesuai dengan tujuan pemerintah dan publik. Implementasi kebijakan publik biasanya diwujudkan dalam bentuk kebijakan undang-undang atau perda yaitu suatu jenis implementasi kebijakan yang perlu mendapatkan penjelasan atau yang biasa sering disebut sebagai peraturan pelaksana.

Implementasi kebijakan tersebut secara operasional antara lain keputusan dan instruksi presiden, keputusan menteri, keputusan dinas, keputusan kepala daerah dan lainnya. Implementasi kebijakan ini pada dasarnya merupakan wujud program yang dijadikan proyek untuk berbagai kegiatan pelaksanaan (Nugroho, 2016).

Menurut Leo Agustino (2016:128) mengatakan bahwa Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan karena melalui prosedur inilah suatu masalah publik dapat diselesaikan atau tidak.

Penting disini karena dalam suatu ketetapan kebijakan hanya akan sekadar menjadi impian atau rencana bagus saja yang tersimpan rapi dalam arsip jika tidak dilaksanakan.

Lanjutnya, Leo Agustino mengatakan bahwa implementasi kebijakan berkaitan dengan adanya tujuan atau sasaran, adanya aktivitas dan adanya hasil. Dari ketiga hal menurut Leo tersebut, maka implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktifitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Menurut Edward III dalam Sutarmin (2016) yang mengemukakan bahwa implementasi kebijakan akan menjadi efektif apabila ditentukan oleh sumber daya, struktur organisasi komunikasi, serta disposisi atau sikap.

Tersedianya sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan, adanya struktur organisasi dalam melaksanakan kebijakan,

Komunikasi berkaitan dengan kebijakan yang dihubungkan dengan komunikasi pada organisasi atau publik, sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat dan sumberdaya berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung khususnya sumber daya manusia.

Kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan atau norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Itu artinya bahwa setiap kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan implementasi yang sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan.

2. Pengertian Kebijakan

Kebijakan atau policy berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang-orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target). Kebijakan merupakan sebuah alat atau instrument untuk mengatur penduduk dari atas kebawah. Kebijakan lebih sering dan secara luas digunakan dalam kaitannya dengan tindakan atau kegiatan pemerintah seperti perilaku negara pada umumnya. Untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan dan tindakan dalam pengambilan keputusan, maka sangat bergantung pada implementasi kebijakan itu sendiri.

Winarno (2016:19) dalam bukunya yang berjudul *Kebijakan Publik Era Globalisasi Teori, Proses dan Studi Kasus Komparatif*, berpendapat bahwa secara umum, istilah kebijakan atau policy digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam bidang kegiatan tertentu. Dalam referensi yang sama Robert Eyestone yang dikutip oleh Winarno (2016:19) mengatakan bahwa “Secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Sedangkan menurut Dye yang dikutip oleh Winarno (2016:19) mengatakan dengan tegas bahwa “kebijakan publik adalah studi tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut, dan apa akibat dari tindakan tersebut”.

3. Pengertian Kebijakan Publik

Dalam kehidupan bernegara-bangsa, apa pun yang dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat dalam konteks pewujudan kehidupan bersama selalu didasarkan pada aturan-aturan yang telah ditentukan. Aturan-aturan tersebut dibuat oleh orang-orang atau lembaga-lembaga yang memang diberi otoritas untuk itu berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu Pemerintah baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit, sehingga disebut kebijakan publik.

Dengan demikian, kebijakan publik terkait dengan dan mencakup berbagai bidang kehidupan bersama, pada semua urusan pemerintahan dari Pusat hingga Daerah. Pada arah yang sangat luas dan kompleks demikian, kiranya batasan pengertian kebijakan publik yang dirumuskan

oleh Thomas R. Dye bisa dipahami. Dye, sebagaimana dikutip Nugroho (2017: 204) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda.

Menurut Laswell dan Kaplan mendefinisikan kebijakan sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan, dan kebijakan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan adanya tujuan, nilai dan praktik (Zainal Abidin dalam Febi Dwi andyani 2020:15). Pengertian serupa mengenai kebijakan publik diungkapkan oleh James E. Anderson dalam Febi Dwi andyani, 2020:15 bahwa kebijakan sebagai arah suatu tindakan yang memiliki maksud dan ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau permasalahan. Kebijakan merupakan jenis tindakan administrasi negara berasal dari kewenangan diskresi yang pada umumnya digunakan untuk menetapkan peraturan kebijakan pelaksanaan undang undang (S Nugraha dalam Mala antika 2017:32).

4. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

a. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Patton dan Sawicki dalam Aditya Eko Putra (2018:11), bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan, dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta

melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan.

Van Meter dan Van Horn (1974) dalam Agustino 2017: 126) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai: “Tindakan dalam keputusan sebelumnya. Tindakan ini mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam waktu kurun maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan mencapai tujuan yang telah diterapkan”.

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks dan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan (Rahmi B, 2018:19).

Proses implementasi melibatkan output dari kebijakan publik, seperti pendanaan atau layanan aktual yang diberikan (Agbazuere, 2020). Implementasi kebijakan publik yang efektif membutuhkan kejelasan dan kekhususan kebijakan, kemampuan kelembagaan organisasi pelaksana, identifikasi kelompok sasaran yang tepat, dan lingkungan di mana kebijakan tersebut akan diimplementasikan. Tanpa memperhatikan faktor-faktor penting ini, kebijakan tersebut akan menghadapi tantangan implementasi yang serius. Tantangan ini termanifestasi terutama dalam

kegagalan, kegagalan kebijakan publik, yang merupakan konsep berikutnya.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier dalam sinta Noviana Mattata (2015:141), implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadminstrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian

Menurut Edward III dalam Sutarmin (2016) yang mengemukakan bahwa implementasi kebijakan akan menjadi efektif apabila ditentukan oleh sumber daya, struktur organisasi komunikasi, serta disposisi atau sikap. tersedianya sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan, adanya struktur organisasi dalam melaksanakan kebijakan, Komunikasi berkaitan dengan kebijakan yang dihubungkan dengan komunikasi pada organisasi atau publik, sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat dan sumberdaya berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung khususnya sumber daya manusia.

b) Model Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik

1. Implementasi Kebijakan Donald Van Metter Dan Carl Van Horn

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Subarsono (2021: 99-101), ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yakni:

a. Standar Dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi.

b. Sumber Daya

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (human resources) maupun sumber daya non-manusia (non-human resources). Dalam berbagai kasus program pemerintah, seperti program jaring pengaman sosial (JPS) untuk kelompok miskin pedesaan kurang berhasil karena keterbatasan kualitas aparat pelaksana.

c. Hubungan Antar Organisasi

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

d. Karakteristik Agen Pelaksana

Yang dimaksud karakteristik adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program.

e. Kondisi Sosial, politik dan ekonomi

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

f. Disposisi Implementor

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni; (a) respon implementor kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, (b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan dan (c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

2) Implementasi Kebijakan publik George C. Edward III

George C. Edward III (Subarsono, 2015:90) menyatakan bahwa ada empat variabel yang harus diperhatikan karena bisa mempengaruhi keberhasilan implementasi dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumber daya

Agar implementasi berjalan dengan efektif maka harus memiliki sumber daya yang diperlukan atau sumber daya yang sesuai untuk mencapai tujuan kebijakan. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia yakni kompetensi implementator dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif.

3. Disposisi

Watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator. Seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

4. Struktur birokrasi

Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi standar (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

5. Definisi Peraturan Bupati

Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah. Peraturan Bupati (Perbup) merupakan suatu jenis Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Bupati dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di tingkat Kabupaten. Dasar hukum utama pembentukannya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022).

Dalam hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, Peraturan Bupati menempati posisi di bawah Peraturan Daerah Kabupaten. Bahwa setiap Perbup yang dibentuk harus bersumber dan berdasar pada Perda Kabupaten, serta tidak boleh mengandung muatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, dan tentunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Pasar Rakyat

Berdasarkan teori ekonomi, pasar tradisional (yang selanjutnya disebut pasar rakyat) wadah atau prasarana bagi pihak para pembeli (konsumen) dan penjual (produsen atau pedagang) untuk melakukan kegiatan transaksi. Dalam kegiatan transaksi ini, kedua belah pihak melakukan transaksi tawar menawar untuk mencapai kesepakatan

mengenai harga sejumlah barang dengan kuantitas tertentu sebagai objek transaksi. Dengan terjadinya transaksi ini maka pihak pembeli memperoleh manfaat dalam bentuk barang yang diinginkan untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan pihak penjual mendapatkan keuntungan yang dapat dilanjutkan untuk membiayai kebutuhan hidup maupun untuk proses produksi dan investasi lebih lanjut pada usaha yang dilakukannya.

Pasar tradisional menjadi salah satu jantung perekonomian masyarakat. Kedudukan pasar tradisional masih tetap penting dan menyatu dalam kehidupan masyarakat. Pasar rakyat di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan pasar lainnya diluar negeri. Banyak masyarakat yang masih membutuhkan pasar tradisional dalam mencari pendapatan dan juga kebutuhan dalam transaksi jual beli. Pasar rakyat di Indonesia memiliki fungsi strategis yang tidak hanya terbatas dari aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial dan budaya, bahkan di daerah perbatasan, pasar dapat dijadikan salah satu strategi untuk memperkuat pertahanan dan keamanan di perbatasan.

7. Pengelolaan Pasar Rakyat

Pembangunan sebuah pasar pada dasarnya adalah guna untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sebagai konsumen atau objek pembangunan pasar itu sendiri. Dalam pelaksanaan pasar itu sendiri tentu dibutuhkan sebuah manajemen tata kelola yang baik untuk keberlangsungan dari pasar itu sendiri. Melalui pengelolaan yang profesional diharapkan dapat menjaga keberlangsungan pasar dengan peningkatan daya saing pasar tradisional dengan pasar modern yang kini

semakin merambah luas hingga ke pelosok daerah sehingga nantinya dapat memberikan kepuasan pelayanan yang baik terhadap pelanggan/masyarakat.

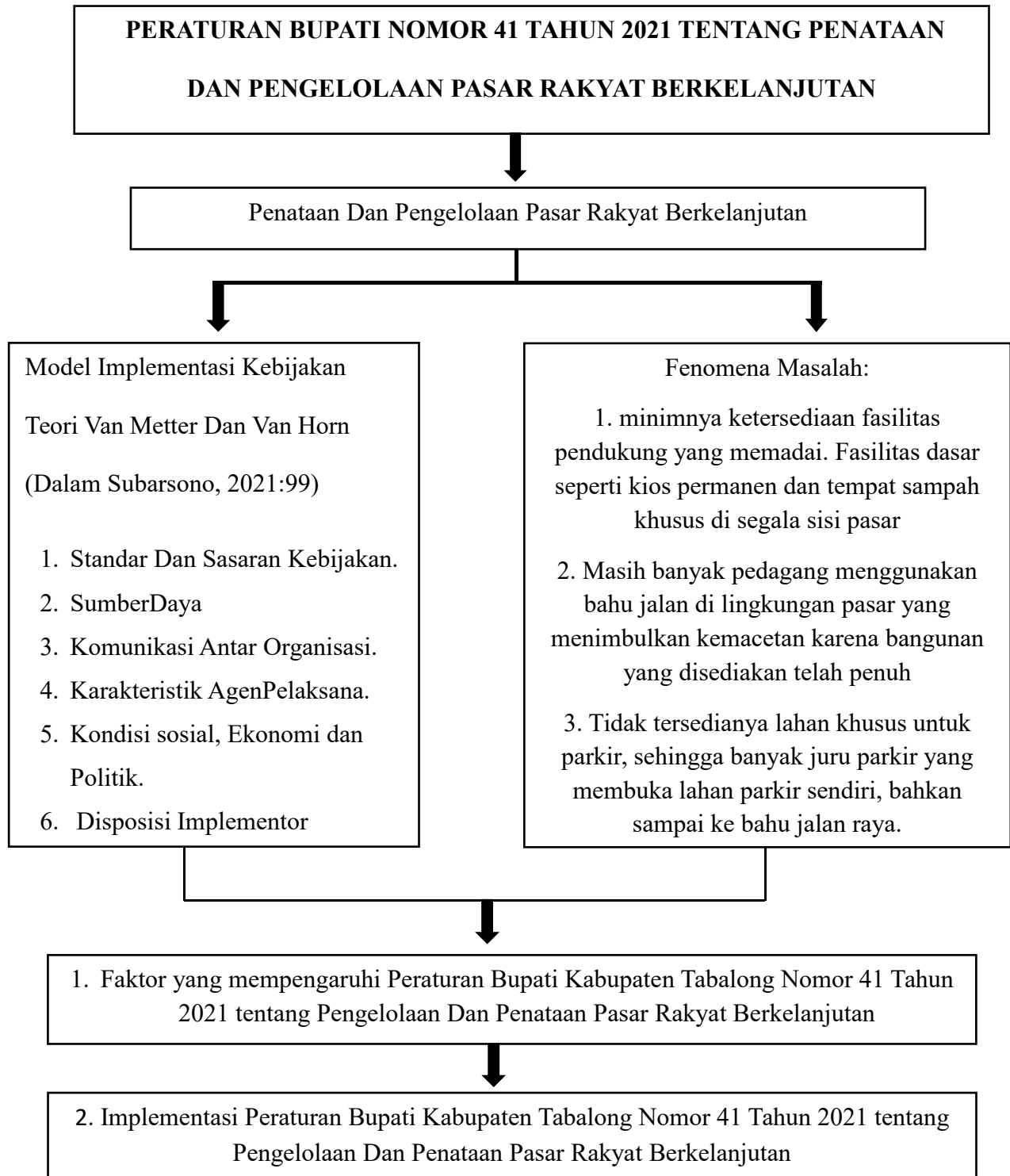
Dalam rangka menjaga eksistensi menghadapi ancaman pasar-pasar modern dalam era globalisasi saat ini, setiap pasar-pasar tradisional dituntut untuk dapat bersaing dengan pasar-pasar modern yang berkembang bak jamur di musim hujan. Selama ini pasar tradisional selalu identik dengan tempat belanja yang kumuh, becek, fasilitas kurang memadai dan penataannya yang masih amburadul, dan karenanya hanya didatangi oleh kelompok masyarakat kelas bawah (Suryani, et al., 2023). Gambaran tersebut harus diubah menjadi tempat yang bersih dan nyaman bagi pengunjung. Dengan demikian, masyarakat dari semua kalangan akan tertarik untuk datang dan melakukan transaksi di pasar tradisional.

Untuk menghilangkan citra buruk tersebut dan mempertahankan eksistensinya, maka pasar tradisional perlu diubah dan diperbaiki. Pada umumnya, kondisi pasar tradisional yang ada di tanah air ini terlihat kurang baik dalam aspek fisik bangunan dan manajemen pengelolaan pasar. Oleh karena itu, perbaikan pada aspek fisik pasar dalam bentuk renovasi bangunan maupun dalam tatanan manajemen pengelolaan dan administratif agar lebih profesional yang dilakukan diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional dalam menghadapi persaingan dengan pasar modern (Nurlaili, et al., 2022)

C. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penataan dan pengelolaan Pasar Rakyat Berkelanjutan di Pasar Pamarangan Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. Dalam penelitian ini dilaksanakan pada Pasar Pamarangan. Pasar Pamarangan berlokasi di Jl. A Yani, Kelurahan Pamarangan Kiwa Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kode Pos 71515.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara nyata dan sistematis terhadap fakta dan karakteristik populasi atau bidang tertentu dengan cermat dan faktual, mencakup pada kepustakaan dimana penulis mengumpulkan berbagai jenis bahan yang ditemukan dari buku-buku, jurnal maupun literatur lain yang berkaitan dengan bahasan yang akan diteliti. Maka peneliti menggambarkan dan menjelaskan secara nyata dan sistematis mengenai Implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penataan Dan Pengelolaan Pasar Rakyat Berkelanjutan Di Pasar Pamarangan Kabupaten Tabalong.

Dalam penelitian kualitatif akan terjadi tiga kemungkinan terhadap “masalah” yang dibawa oleh peneliti dalam penelitian. Pertama masalah yang dibawa oleh peneliti tetap, sehingga sejak awal sampai terakhir penelitian sama.

Yang kedua “masalah” yang dibawa peneliti secara setelah memasuki penelitian berkembang yaitu memperluas atau memperdalam masalah telah disiapkan. Yang ketiga “masalah” yang dibawa oleh peneliti setelah memasuki lapangan berubah total, sehingga harus “ganti” masalah (Sugiyono,2016:205).

C. Tipe penelitian

Jenis tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Menurut Sugiyono (2016:13) bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada penelitian, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif\kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna generalisasi.

Menurut Sugiyono (2016:35) “metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan antara variabel satu dengan yang lain. Metode deskriptif dapat disimpulkan sebagai sebuah metode yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan keadaan di lapangan secara sistematis dengan fakta-fakta

interpretasi yang tepat dan data yang saling berhubungan, serta bukan hanya untuk mencari kebenaran mutlak tetapi pada hakekatnya mencari pemahaman observasi.

D. Data dan Sumber Data

Menurut Moleong (Ibrahim, 2018:66) Data adalah kata-kata atau tindakan yang relevan dengan penelitian. Menurut Bungin (Ibrahim, 2018:66) data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang berupa informasi dan fakta.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari peneliti secara langsung dari hasil penelitian dan tidak melalui perantara, kemudian diolah sendiri yakni data yang digunakan untuk menganalisis maupun untuk pembahasan hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penataan Dan Pengelolaan Pasar Rakyat Berkelanjutan di Pasar Pamarangan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu sumber data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung berupa buku-buku, sejarah singkat, struktur organisasi, visi dan misi, laporan-laporan serta data lainnya terkait dengan penelitian yang dibahas.

3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah informan yang diwawancarai yang dianggap layak dipercaya atau orang

yang berkompeten untuk memberikan informasi data yang relevan dengan masalah yang diteliti atau informan yang dipilih adalah orang yang menguasai permasalahan dan memiliki pengalaman sesuai dengan topik dalam penelitian ini. Seperti dalam table 3.1 berikut

Tabel 3. 1
Data Informan

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1.	Sugianoor,S.Si	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1
2.	Agus Nadi, S. AP	Kepala UPTD Pasar	1
3.	Fitriani, S. AP	Kasub Bag TU	1
4.	Muhammad Suhaimi	Pengadministrasian Perkantoran	1
5.			1
6.	Norjannah	Pedagang Baju	1
7.	H. Muhammad Arsyad	Pedagang Sepatu	1
8.	Yanto	Pedagang Sayur	1
9.	Murdin	Pedagan Kue	1
10	Hj. Mariati	Pedagang Sembako	1
11	Nurullah	Pedagang Perhiasan	1
12.	Hidayanti	Pedagang Makanan	1
Jumlah			

E. Desain Operasional Penelitian

Definisi Operasional adalah variabel penelitian dimaksudkan untuk memahami arti setiap variabel sebelum dilakukan analisis. Instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah atau mengumpulkan, mengelola, menganalisis dan menyajikan data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan. Penelitian kualitatif sebagai human

instrumen berfungsi menetapkan fokus penelitian, memiliki informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data.

Desain Operasional ini menggunakan variabel implementasi kebijakan dan menggunakan beberapa sub variabel untuk penelitian di Pasar Pamarangan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong.

Tabel 3. 2
Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Implementasi (Van metter dan Van Horn dalam Subarsono, 2021:99-101)	1. Standar Dan Sasaran Kebijakan.	a. Ukuran dan Tujuan kebijakan b. Sasaran kebijakan
	2. Sumber Daya	a. Sumberdaya manusia b. Sumberdayafisik/ fasilitas
	3. Komunikasi Antar Organisasi.	b. Koordinasi antar organisasi c. Sosialisasi antar organisasi
	4. Karakteristik Agen Pelaksana.	a. Hubungan dalam birokrasi formal/informal b. Struktur birokrasi
	5. Kondisi sosial, Ekonomi dan Politik.	a. Dukungan sosial b. Dukungan ekonomi c. Dukungan Politik
	6. Disposisi Implementor	a. Sikap dan pandangan pelaksana terhadap kebijakan Intensitas b. Pemahaman pelaksana akan tujuan dan sasaran kebijakan

Sumber: Subarsono 2021

F. Teknik Pengumpulan Data

Penulis melakukan teknik pengumpulan data pada penelitian dengan cara mendapatkan data dan informasi dengan menggunakan teknik berikut:

1. Teknik Observasi (Pengamatan)

Observasi Menurut Sutrisno (dalam Darmayanti, 2021:25) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

Observasi adalah kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.

2. Wawancara

Sugiyono (2016:157) menjelaskan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber yang memiliki ketertarikan langsung dengan penelitian yang dilakukan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik mendapatkan dan pengumpulan data dengan kajian secara teoritis mengenai masalah yang akan diteliti dengan cara mengumpulkan data dokumen. Dokumentasi dapat meliputi penyelidikan terhadap benda-benda tertulis seperti buku-buku dokumen pribadi maupun dokumen resmi peraturan dalam arsip dari pihak yang terkait yang berasal instansi yang akan diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dapat dimaknai sebagai proses menyiapkan data, menyusun, memilah dan bermakna. Analisis data menurut Sugiono (2015:92) adalah kegiatan analisis mengkatagorikan data untuk mendapatkan

pada hubungan tema, menafsirkan apa yang berminat, serta menyiapkan dan melaporkannya kepada orang lain yang berminat.

Berikut ini adalah cara-cara yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis data, yaitu:

1. Kondensasi data (Data Condensation)

Menurut Miles dan Huberman (Zuchri Abdussamad, 2021:160-162) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display dan conclusion drawing/verification.

a. *Data reduction* (reduksi data)

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan.

b. *Data display* (Penyajian data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

c. Conclusion Drawing/Verification

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

2. Peningkatan ketekunan

Peningkatan ketekunan data dalam penelitian, merupakan melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan sehingga fenomena akan dapat direkam secara pasti dapat memberikan deskripsi data yang akurat tentang apa yang diamati.

3. Trianguasi

Trianguasi merupakan pengecekan kembali data yang ditemukan dilapangan dengan beberapa sumber dan dengan teknik serta waktu yang berbeda. Dengan demikian terdapat trianguasi yang terdiri dari trianguasi sumber, trianguasi teknik dan trianguasi waktu. Dari hasil wawancara, observasi dan teknik lain dalam situasi berbeda.

4. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemkan oleh peneliti. Data tentang interaksi, atau gambaran suatu keadaan yang perlu didukung dengan foto-foto. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga dapat lebih dipercaya.

5. Mengadakan *Membercheck*

Membercheck merupakan proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data tersebut, hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai atau tidak dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti datanya tersebut valid/terpercaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2021. Peraturan Bupati Kabupaten Tabalong Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penataan Dan Pengelolaan Pasar Rakyat Berkelanjutan.
- Agustino, Leo. 2016. *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers
- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-dasar kebijakan publik* (Edisi Revisi). Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2020. *Teori dan Praktik Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anderson, J. E. 2020. *Public Policy Making*. Dalam Febi Dwi Andayani (Ed.), *Analisis Kebijakan Publik* (hlm. 15). Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Ahmad Rijali Noor. 2024. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penataan Dan Pengelolaan Pasar Rakyat Berkelanjutan Kabupaten Tabalong (Studi Kasus Pasar Muara Uya). Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
- Bungin, B. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Darmayanti, N. 2021. *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Dye, T. R. 2016. *Understanding Public Policy*. Dalam Winarno (Ed.), *Kebijakan Publik Era Globalisasi: Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif* (hlm. 19). Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service.
- Erna Rustiana. 2022. Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional di Kecamatan Samarang Kabupaten Garut (Studi Pasar Wisata Samarang). Universitas Garut, Jawa Barat, Indonesia
- Harsono, H. 2018. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ibrahim, M. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Laswell, H. D., & Kaplan, A. 2020. *Power and Society*. Dalam Zainal Abidin (Ed.), *Teori Kebijakan Publik* (hlm. 15). Jakarta: Kencana
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. 2016. *Implementation and Public Policy*. Dalam Leo Agustino (Ed.), *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (hlm. 128). Bandung: Alfabeta.
- Moleong, L. J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawi, Mulyadi. 2018. *Implementasi Kebijakan dan Dinamika Pelaksanaan*. Malang: UB Press.
- Nurlaili, et al. 2022. *Pengelolaan Pasar Tradisional di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Ilmu.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suryani, et al. 2023. *Transformasi Pasar Tradisional*. Jakarta: Gramedia.

Tim. 2022. *Pedoman Penyusunan Dan Penulisan Skripsi Sarjana (SI)* Amuntai, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.